

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchtarudin Siregar, 2012, *Beberapa Permasalahan Ekonomi dan Manajemen Transportasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1990, *Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Djafar S, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philips M.Hadjon , Sri Soemantri Martosoewignjo, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Soegijanta Tjakranegara,1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* Graha Ilmu.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.



B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

